PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Makalah Ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester (UAS)

Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu:

Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP,.M.Si.

Disusun Oleh:

Reisya Nur Fauziyah (51924127)

Kelas: DKV 4

Universitas Komputer Indonesia

Fakultas Desain

Prodi Desain Komunikasi Visual

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
Soal 1 3
Jelaskan menurut Anda apa pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi! 3
Soal 2 5
Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi! 5
Soal 3 7
Sebutkan dan jelaskan empat (4) landasan pembangunan nasional! 7
Soal 4 9
Salah satu bentuk Pendidikan Kewarganegaraan adalah identitas nasional. Berikan pandangan Anda terkait dengan dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia, beserta dengan contoh kasusnya! 9
Soal 5 11
Buatkan Resume Jurnal Kelompok Anda 11
Daftar Pustaka 13

Soal 1

Jelaskan menurut Anda apa pentignya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi!

Jawab: Menurut saya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi itu penting, karna di umur mahasiswa ini berada di fase kritis yang bagaimana mahasiswa berpikir kritis, banyak bertanya, dan juga mulai mencari atau menemukan jati diri sebagai warga negara. Maka dari itu mata kuliah ini sangat penting untuk menerapkan cara berpikir dan sikap mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran berbangsa yang sangat kuat.

Mata kuliah ini mempelajari lebih dalam tentang apa itu bangsa dan negara, mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi, apalagi Indonesia negara beragam yang menjunjung toleransi. Tak luput dari kata demokrasi, Pada masa kini banyak sekali isu-isu sensitif yang membuat Masyarakat terpecah. Maka dari itu mahasiswa belajar bagaimana walaupun berbeda pendapat tidak selalu diakhiri dengan perpecahan seperti ribut, kita belajar untuk menjadi warga negara yang punya sikap dewasa dan terbuka.

Yang terpenting dari mempelajari mata kuliah ini adalah tidak berbuat apatis dengan urusan sosial dan politik, karna masih banyak mahasiswa yang berpikir bahwa "politik mah buat orang tua" padahal 1 suara warga negara itu sangat penting, lewat mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk peduli, untuk mengerti akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan pelan-pelan bisa untuk mengikuti berkontribusi untuk perubahan, sekecil apapun itu. Kadang kita cuma focus untuk menuntut hak, tapi lupa kalau sebagai warga negara juga punya kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga keutuhan bangsa, misalnya lewat partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ikut pemilu, atau untuk tidak membuang sampah sembarangan juga menurut saya termasuk. Hal-hal kecil yang sering kita sepelekan sebenarnya sangat berdampak untuk negara, apalagi jika hal sepele itu dilakukan secara bersamaan, bisa terbayang seberapa besarnya dampak yang kita lakukan.

Mahasiswa secara tidak langsung berada ditahap proses pembentukan karakter dan etika sosial, sebagai manusia yang lebih peka, memiliki rasa empati, dan tidak egois dalam kehidupan bermasyarakat. Karna banyak sekali tantangan moral dan sosial yang dihadapi. Mata kuliah ini membantu membekali mahasiswa dengan etika kebangsaan, tanngung jawab sosial. Mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan atau *agent of change.* Untuk bisa membawa perubahan positif, mereka butuh pemahaman mendalam tentang system kewarganegaraan, hukum, dan tata nilai yang hidup dalam Masyarakat. Yang nantinya mahasiswa mendapat Gambaran tentang bagaimana negara ini dipertahankan dan dibangun sedemikian rupa atas prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadikan fondasi kehidupan yang bermasyarakat di Indonesia. Misalnya, pentingnya toleransi, keadilan, kebebasan berpendapat, dan hidup berdampingan dalam keberagaman yang sudah saya jelaskan di paragraf sebelumnya.

Menurut saya sebagai mahasiswa, mata kuliah ini bisa juga dijadikan ruang refleksi, mengapa? Karna mahasiswa akan berpikir ulang, sebenarnya kit aini sudah cukupkah peduli terhadap lingkungan sekitar? Sudah cukup kah berkontribusi untuk membuat perubahan kecil di komunitas kita? Misalnya, terlibat dalam organisasi kampus, ikut serta

dalam kegiatan sosial, atau sekedar saling bantu antar teman bahkan saudara sendiri tanpa memandang latar belakang. Matakuliah ini bagi saya bukan hanya teori, tapi kita belajar bagaimana kita menanggapi atau mempraktikkannya langsung di kehidupan sehari-hari.

Intinya, pentignya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi itu bukan hanya menjadikan kita sebagai mahasiswa pintar secara akademik, tapi juga punya karakter dan sikap yang kuat sebagai seorang warga negara. Karena menurut saya percuma jika kita mahasiswa mendapatkan IPK yang tinggi tapi tidak punya rasa peduli dengan kondisi bangsanya sendiri. Dengan mempelajari matakuliah ini membuat mahasiswa menjadi lebih peka, lebih bijak, dan punya semangat untuk ikut mengambil bagian untuk membangun Indonesia Maju, sesuai kapasitas mahasiswa masing-masing.

Soal 2

Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi!

Jawab: Demokrasi secara spontan pastinya kita akan mengaitkan dengan kebebasan berpendapat, pemilu, atau suara rakyat. Tapi sebenarnya, demokrasi itu lebih dari sekadar sistem pemilihan umum. Demokrasi punya prinsip dan nilai-nilai yang harus dijaga supaya tidak hanya sebagai slogan, tapi benar-benar terasa dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip ini berarti kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat punya hak unutuk memilih pemimpin, menyampaikan aspirasi, bahkan mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi, bukan cuma elite atau petinggi politik yang berperan, tapi semua warga negara punya bagian penting dalam menentukan arah negara.

Kedua, persamaan hak. Dalam demokrasi, setiap orang siapa pun dia profesinya memiliki hak yang sama di mata hukum dan dalam berpendapat. Mau dia seorang yang kaya, miskin, pria, wanita, dari suku atau agama apa pun, semuanya punya kesempatan yang sama untuk didengar dan diperlakukan adil dihadapan hukum. Ini penting banget supaya nggak ada yang merasa dikucilkan atau dipinggirkan dari proses demokrasi.

Ketiga, kebebasan berpendapat. Demokrasi yang sehat akan memberikan ruang untuk semua orang menyampaikan pandangan dan kritik/saran. Tapi tentu saja, kebebasan ini harus diiringi dengan tanggung jawab. Tidak asal mengutarakan pendapat, apalagi sampai menyebar hoaks atau ujaran kebencian. Intinya, bebas tapi tetap menyantumkan konteks dan etika.

Kempat, prinsip musyawarah untuk mufakat, prinsip ini sudah menjadi prinsip yang turun menurun warga Indonesia. Kalau ada perbedaan pendapat, solusinya bukan saling jegal apalagi ribut, tapi dirundingkan secara terbuka sampai menemukan titik temu. Ini menunjukan kalau demokrasi kita juga menghargai nilai pendapat seseorang, gotong royong dan kebersamaan.

Penegakan hukum dan keadilan. Demokrasi yang ideal harus punya sistem hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Siapa pun yang salah harus diproses secara adil, dan yang benar harus dilindungi. Kalau hukum cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya demokrasi bisa rusak, Kembali lagi, jika mengsepelekan hal-hal yg kecil, jika di lakukan bersamaan akan menjadi dampak yang sangat besar.

Dari prinsip-prinsip ini, muncul nilai-nilai demokrasi kayak toleransi, tanggung jawab, partisipasi aktif, dan keadilan. Demokrasi tidak akan jalan jika masyarakatnya cuek atau malah bersikap apatis. Maka dari itu, sebagai mahasiswa, kita juga punya peran penting untuk menjaga nilai-nilai ini lewat hal-hal kecil, seperti ikut organisasi, ikut diskusi publik, atau sekadar menyuarakan opini secara sehat dan sopan.

Selain itu, nilai demokrasi juga mengajarkan kita untuk terbuka dengan perbedaan. Di negara Indonesia yang beragam, pasti banyak sekali pandangan atau pendapat yang gak sama. Tapi justru di situlah tantangannya. Demokrasi mengajarkan warganya untuk tidak mudah terbawa emosi atau tersinggung jika terdapat pandangan yang berbeda. Kita harus sigap membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang sekadar omong-omong belaka. Dengan sikap terbuka, kita bisa belajar dan berkembang bersama, tanpa harus saling menjatuhkan. Nilai penting lainnya adalah partisipasi aktif. Demokrasi gak akan berjalan kalau rakyatnya pasif.

Partisipasi gak harus selalu dalam bentuk ikut demo atau turun ke jalan, tapi bisa juga dengan hal-hal kecil, misalnya ikut diskusi di kampus, bijak dalam menggunakan sosial media melihat source nya dahulu apakah itu benar adanya atau hanya kebohongan yang diciptakan, atau sekadar diskusi dengan orang sekitar tentang isu-isu sosial. Mahasiswa sebagai generasi muda punya peran besar untuk mengajak masyarakat buat lebih peduli dengan lingkungan sekitar.

Terakhir, menurut saya demokrasi juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab moral. Artinya, setiap tindakan atau pendapat yang kita sampaikan itu punya konsekuensi. Kita gak bisa asal ngomong atau asal bertindak atas nama "kebebasan", tapi lupa bahwa orang lain juga punya hak yang sama. Demokrasi yang sehat itu bukan yang bebas sebebas-bebasnya, tapi yang saling menjaga. Jadi, sebagai mahasiswa, kita harus bisa jadi contoh kecil dari demokrasi yang beretika, beradab, dan tetap menghargai sesama.

Soal 3

Sebutkan dan jelaskan empat (4) landasan pembangunan nasional!

Jawab: Dalam menjalankan pembangunan nasional, Indonesia tidak bergerak secara sembarangan, melainkan berdasarkan prinsip dan pijakan yang telah disepakati sebagai arah kebijakan. Empat landasan utama pembangunan nasional berfungsi sebagai fondasi agar seluruh proses pembangunan tetap sejalan dengan cita-cita bangsa, nilai-nilai pancasila, dan tujuan negara. Keempat landasan tersebut meliputi landasan idiil, konstitusional, operasional, dan yuridis.

1. Landasan Idiil: Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijakan pembangunan. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila memberikan arahan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan kehidupan yang berketuhanan. Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (people-centered development), dengan semangat gotong royong dan inklusivitas.

2. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 menjadi landasan hukum tertinggi dalam setiap langkah pembangunan nasional. Dalam konstitusi ini, terdapat rumusan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus tunduk dan sesuai dengan semangat serta pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945.

3. Landasan Operasional: RPJPN dan RPJMN

Landasan operasional mencakup perencanaan pembangunan yang disusun dalam dokumen strategis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPN merupakan rencana pembangunan jangka panjang selama 25 tahun, sedangkan RPJMN disusun untuk jangka waktu 5 tahunan menyesuaikan dengan masa pemerintahan. Melalui dokumen ini, pembangunan nasional menjadi lebih terarah, sistematis, dan dapat dievaluasi setiap periodenya.

4. Landasan Yuridis: Peraturan Perundang-Undangan

Setiap bentuk kebijakan pembangunan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Landasan yuridis ini mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Dengan adanya payung hukum yang sah, pembangunan dapat dijalankan secara tertib, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, keempat landasan tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Tanpa adanya landasan yang jelas, pembangunan bisa berjalan tidak terarah, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Oleh karena itu, penting bagi

setiap elemen bangsa, termasuk mahasiswa sebagai generasi muda, untuk memahami landasan pembangunan ini agar dapat turut serta mengawal pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Soal 4

Salah satu bentuk Pendidikan Kewarganegaraan adalah identitas nasional. Berikan pandangan Anda terkait dengan dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia, beserta dengan contoh kasusnya!

Jawab: Dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia, identitas nasional bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dialektika antara nilai-nilai kebangsaan dan perkembangan sosial masyarakat. Mahasiswa, sebagai pemuda sosial yang terdidik, menjadi bagian penting dalam proses perumusan dan penguatan identitas nasional. Artikel karya Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.. berjudul "PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH MUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019" (Kurniasih, 2020) menjadi representasi konkret bagaimana mahasiswa menyikapi hak politik mereka dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dalam artikel tercatat bahwa masih ada problematika rendahnya partisipasi aktif mahasiswa dalam Pemilu 2019. Seperti yang tertulis dalam artikelnya, "Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok terdidik diharapkan mampu memahami pentingnya partisipasi politik dalam membentuk arah masa depan bangsa, namun kenyataannya tidak semua mahasiswa menggunakan hak pilihnya dengan kesadaran penuh" (Kurniasih, 2020)

Bisa kita lihat bahwa pernyataan ini menjadi refleksi bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda belum sepenuhnya utuh, masih ada mahasiswa yang menyepelekan hal kecil, seperti pemungutan suara.

Hal ini menunjukkan adanya dinamika identitas nasional yang bersinggungan dengan pengalaman nyata di lapangan. Banyak mahasiswa yang merasa skeptis terhadap sistem politik, merasa suara mereka tidak berdampak. Padahal, menurut penulis artikel yaitu ibu Dewi "Peran mahasiswa tidak hanya sebagai pemilih pasif, tetapi sebagai bagian dari kontrol sosial dan moral dalam sistem demokrasi" (Kurniasih, 2020)

Ini menunjukkan bahwa identitas nasional bukan sekadar simbol formal seperti upacara bendera dan lagu kebangsaan, melainkan bagaimana individu terlibat dalam proses kebangsaan sehari-hari, demokrasi.

Tantangan identitas nasional juga muncul dari adanya pendidikan kewarganegaraan di kampus seperti penjelasan saya dipertanyaan sebelumnya dan kenyataan politik di lapangan. Artikel ini menyoroti bahwa pengetahuan politik tidak secara otomatis membentuk perilaku politik, jika mahasiswa itu sendiri tidak serius dalam mempelajari ilmu Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Perguruan Tinggi "Kendala partisipasi mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap calon atau partai politik yang dianggap tidak merepresentasikan aspirasi mereka," (Kurniasih, 2020)

Ini menjadi tantangan bagi negara untuk memperkuat pendidikan politik yang bermakna dan relevan bagi generasi muda.

Dengan demikian, artikel ini menjadi contoh nyata bahwa dinamika dan tantangan identitas nasional dapat dipahami melalui studi kasus partisipasi politik mahasiswa. Kesadaran akan

hak dan kewajiban sebagai warga negara masih terus bergulat dengan konteks sosial-politik yang dihadapi. Maka dari itu, perlu ada strategi yang lebih substansial dalam membangun identitas nasional di kalangan generasi muda terutama mahasiswa bukan hanya melalui formalitas, tapi lewat keterlibatan aktif dan kritis terhadap persoalan kebangsaan.

Soal 5

Buatkan Resume Jurnal Kelompok Anda, MINIMAL SATU (1) HALAMAN PENUH, dengan rincian sbb. :

- Judulu jurnal
- Nama Anggota Kelompok
- Pendahuluan
- Tinjauan Pustaka
- Hasil Pembahasaan
- Kesimpulan
- Daftar Pustaka

Jawab:

Judul Jurnal: Kekerasan Seksual di Lingkungan Medis di Kota Bandung: Analisis Berdasarkan Data Valid dan Sumber *Real-Time*

Nama Anggota Kelompok:

1. Ilham Daniswara (51924150)
2. Muhammad Raihan Ghifary Angga (51924135)
3. Naila Maritza (51924120)
4. Nino Andhika Haryadi (51924143)
5. Reisya Nur Fauziyah (51924127)

Pendahuluan:

Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di ruang publik atau domestik, tapi juga bisa muncul di ruang yang seharusnya aman seperti rumah sakit. Di Kota Bandung, kasus kekerasan seksual oleh dokter residen terhadap pasien di RSHS menjadi sorotan karena pelakunya adalah tenaga medis yang seharusnya melindungi pasien. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa sering kekerasan seksual terjadi di fasilitas medis, bagaimana persepsi masyarakat terhadapnya, serta bagaimana sistem hukum dan pengawasan berjalan dalam kasus seperti ini.

Tinjauan Pustaka:

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif menggunakan kuisioner google form. Kuesioner dipilih karena dapat mengukur persepsi dan pengalaman secara langsung. Tujuannya adalah untuk menggali pemahaman, dan pengalaman masyarakat tentang kekerasan seksual di lingkungan medis. Sumber yang digunakan dalam studi ini sepenuhnya berasal dari informasi yang sahih, baik berupa liputan media nasional maupun dokumen hukum resmi seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan KUHP.

Hasil dan Pembahasan:

Dari hasil survei terhadap 40 responden masyarakat umum di Kota Bandung, ditemukan beberapa poin penting:

- 60% responden mengetahui adanya kekerasan seksual di fasilitas medis
- 25% mengaku atau mengenal orang dekat yang pernah menjadi korban
- 40% menyebutkan dokter sebagai pelaku yang paling sering dilaporkan
- 55% merasa fasilitas medis belum menyediakan prosedur pelaporan yang aman
- 70% menilai korban cenderung takut melapor karena stigma dan tekanan sosial
- 80% menyarankan adanya penegakan hukum dan edukasi internal tenaga medis

Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual cukup tinggi, namun belum diimbangi dengan sistem pelaporan yang efektif. Rumah sakit dinilai masih memiliki celah dalam hal pengawasan, terutama terhadap dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis. Dari sisi hukum, pelaku dapat dikenakan pasal pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penggunaan obat bius tanpa indikasi medis (Pasal 98 UU Kesehatan), serta Undang-Undang TPKS.

Kesimpulan:

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan medis bukan hanya masalah individu, tetapi juga sistemik. Lemahnya pengawasan, kurangnya prosedur pelaporan yang aman, dan ketakutan korban dalam menyuarakan kasusnya membuat penyelesaian kasus seringkali terhambat. Penegakan hukum yang tegas dan edukasi internal terhadap tenaga medis menjadi kunci utama untuk mencegah kejadian serupa. Institusi medis juga harus lebih proaktif dalam menciptakan ruang aman bagi pasien, karena perlindungan terhadap pasien bukan hanya soal pelayanan, tapi juga hak dan martabat manusia.

Daftar Pustaka:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Tempo.co. (2024). Kronologi Kekerasan Seksual Dokter PPDS Priguna di RSHS Bandung. Diakses pada 28 Juli 2025, dari https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kekerasan-seksual-dokter-ppds-priguna-di-rshs-bandung-1230818
- Detik.com. (2024). Tampang Oknum Residen yang Lecehkan Penunggu Pasien RSHS. Diakses pada 28 Juli 2025, dari https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7861238/tampang-oknum-residen-yang-lecehkan-penunggu-pasien-rshs
- Hukumonline.com. (2024). Jerat Hukum yang Dapat Dikenakan Terhadap Dokter Residen Tersangka Kasus Pemerkosaan. Diakses pada 28 Juli 2025, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-yang-dapat-dikenakan-terhadap-dokter-residen-tersangka-kasus-pemerkosaan-lt67f781ee05919/

Daftar Pustaka

Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S. (2020). *PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH MUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019.* Bandung: FISIP UNIKOM (Universitas Komputer Indonesia).

Daniswara, I., Ghifary Angga, M. R., Maritza, N., Haryadi, N. A., & Fauziyah, R. N. (2025). *Kekerasan Seksual di Lingkungan Medis di Kota Bandung: Analisis Berdasarkan Data Valid dan Sumber Real-Time.* Bandung.